

# Motif Jepang Menandatangani Perjanjian Akses Timbal Balik Jepang – Australia

*Japan's Motivation for Signing Reciprocal Access Agreement Japan – Australia*

Eka Cahyandari

Universitas Jember

Email: 170910101015@mail.unej.ac.id

---

## Riwayat Artikel

Diterima: 2 Juli 2024  
Direvisi: 1 Oktober 2024  
Disetujui: 28 Oktober 2024

doi: 10.22212/jp.v15i2.4527

---

## Abstract

*This research aims to analyze Japan's motives for signing the Reciprocal Access Agreement (RAA) with Australia. Using qualitative descriptive method and secondary data collection from literature studies, the analysis is based on Stephen M. Walt's Balance of Threat theory. The study reveals that Japan's decision to enter the RAA is influenced by the perceived threat from China, encompassing four critical aspects. Firstly, China's superior military, economic, and population strength compared to Japan. Secondly, the geographical proximity, with the closest distance between Japan and China being 603 km. Thirdly, China's offensive capabilities, highlighted by its development and test launches of hypersonic missiles. Lastly, the aggressive intentions perceived by Japan, viewing China as a potential threat to security and peace in the Indo-Pacific region. In response to these threats, Japan has chosen to balance with Australia, influenced by three main factors. Firstly, Japan's relatively stronger military capabilities compared to Australia. Secondly, the strategic alignment and availability of allies, with Japan recognizing shared interests with Australia. Thirdly, the current period of peace, despite the looming threats, has prompted Japan to solidify its security posture through the RAA with Australia. This strategic alliance is seen as a measure to enhance Japan's security and stability in the face of potential Chinese aggression.*

**Keywords:** *Australia; Balance of Threat; Balancing; Japan; Reciprocal Access Agreement.*

---

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif Jepang menandatangani perjanjian Akses Timbal Balik atau (Reciprocal Access Agreement, RAA). Dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data sekunder dari studi pustaka, serta bersandar pada teori Balance of Threat dari Stephen M. Walt. Melalui analisis teori Balance of Threat dan dari sudut pandang Jepang, ditemukan bahwa motif Jepang menandatangani RAA dipengaruhi oleh aspek tingkat ancaman yang berasal dari Tiongkok dan tiga faktor yang menentukan Jepang untuk memilih melakukan *balancing* dengan Australia. Empat aspek tingkat ancaman yang berasal dari Tiongkok yaitu, pertama aspek kekuatan, Tiongkok secara militer, ekonomi, populasi, lebih besar dibandingkan Jepang. Kedua, aspek kedekatan geografis, jarak terdekat Jepang dan Tiongkok berjarak 603 km. Ketiga, aspek kekuatan ofensif, Tiongkok memiliki kemampuan militer khusus yaitu misil hipersonik yang telah diuji coba diluncurkan. Keempat, aspek niatan agresif, Jepang memandang Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan militer besar yang agresif dan berpotensi mengancam keamanan dan perdamaian di kawasan Indo Pasifik. Ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok membuat Jepang memilih melakukan *balancing* dengan Australia. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi Jepang melakukan *balancing* dengan Australia. *Pertama*, Jepang merupakan negara kuat secara militer dibandingkan Australia. *Kedua*, Jepang memang memiliki kekuatan internalnya sendiri dalam hal militer, namun karena melihat kepentingan yang

sama dengan Australia, Jepang memilih melakukan *balancing* dengan Australia. Ketiga, masa sekarang adalah masa damai dan belum terjadi perang antara Jepang dan Tiongkok. Namun di masa damai Jepang memilih melakukan *balancing* melalui perjanjian RAA Jepang - Australia.

**Kata Kunci:** Australia; *Balance of Threat*; *Balancing*; Jepang; RAA.

## Pendahuluan

Australia dan Jepang merupakan dua negara di kawasan Asia Pasifik yang telah menjalin hubungan baik selama bertahun-tahun. Hubungan Jepang - Australia dipersatukan oleh nilai - nilai bersama, termasuk komitmen terhadap demokrasi, hak asasi manusia, perdagangan bebas, dan tatanan internasional berbasis aturan. Kemitraan Jepang - Australia penting bagi kepentingan strategis dan ekonomi kedua negara. Kepentingan strategis yang sama Jepang - Australia termasuk aliansi mereka dengan Amerika Serikat (AS), dan komitmennya terhadap kawasan Indo - Pasifik yang terbuka, stabil, dan sejahtera. Perekonomian kedua negara saling melengkapi, berakar kuat di Indo - Pasifik dan bergantung pada perdagangan bebas dan terbuka serta rantai pasokan yang tangguh. Kawasan Indo-Pasifik penting bagi kedua negara tersebut.

Hubungan baik yang terjalin antara Jepang dan Australia tidak terlepas dari peran yang dimiliki oleh AS. Baik Jepang maupun Australia sama-sama menjadikan AS sebagai sekutu utamanya.<sup>1</sup> Jepang dan Australia memang telah memiliki AS sebagai sekutu utamanya, namun pada tahun 2014 kedua negara lebih memperkuat hubungannya lagi dengan mulai menginisiasi perjanjian (*Reciprocal Access Agreement*, RAA). Perjanjian RAA sendiri ditandatangani oleh Jepang diluar *the Status of Forces Agreement* yang dimiliki antara Jepang dan AS.<sup>2</sup> Perjanjian RAA antara

Jepang dan Australia hanya meningkatkan hubungan kerja sama mereka menjadi *Special Strategic Partnership* (SSP) dan bukan sebagai sekutu aliansi pertahanan.<sup>3</sup> Meskipun kedua negara memiliki AS sebagai sekutu, RAA Jepang - Australia memperdalam hubungan kedua negara menjadi SSP.

Secara historis perkembangan kekuatan militer Tiongkok telah menjadi pusat kekhawatiran bagi Jepang dan AS. Pada tahun 1991, tingkat pertumbuhan pengeluaran militer Tiongkok yang mencapai angka dua digit, selalu menjadi ancaman bagi Jepang. Pada tahun 2007, pengeluaran militer Tiongkok meningkat menjadi 60 miliar dolar, jauh melebihi Jepang yang mencapai 40 miliar dolar.<sup>4</sup> Kepentingan keamanan nasional Tiongkok melibatkan klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan (LCS). Dominasi Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan dapat memungkinkannya untuk memiliki keunggulan strategis dan pengaruh terhadap persaingan strategis Tiongkok - Jepang di Asia Timur. Hal itu mengisyaratkan bahwa hal ini akan meningkatkan posisi strategis Tiongkok atas sengketa Laut Tiongkok Timur (LCT) serta persaingannya untuk mendapatkan kepemimpinan regional, karena Tiongkok dan Jepang memiliki sengketa Kepulauan Senkaku.<sup>5</sup> Dalam konteks persaingan strategis yang meningkat baik di bidang keamanan dan ekonomi antara Tiongkok dan sekutu

3 Thomas Wilkins, "Enhancing the "Special Strategic Partnership": Australia and Japan Sign Reciprocal Access Agreement", Sasakawa Peace Foundation, February 21, 2022, [https://www.spf.org/iina/en/articles/thomas\\_04.html](https://www.spf.org/iina/en/articles/thomas_04.html).

4 Kazumichi Uchida, "Between Balance and Bandwagon Friendship of the US and Japan". JPI: Spring 2016 Issue: 42.

5 Weifeng Zhou, "China's growing assertiveness in the South China Sea", ARI 60/2015: 8.

1 Craig William Mark, "'Almost An Alliance: The Development of Japanese - Australian Relations". The *Kyoritsu journal of international studies*: 111.

2 HDPEnvall, "Australia-Japan defence deal: noteworthy, not newsworthy", January 22, 2018, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-japan-defence-deal-noteworthy-not-newsworthy>.

AS, Kedua negara kemudian bertekad untuk menegakkan visi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP).<sup>6</sup> Dominasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LCS) dan Laut Tiongkok Timur (LCT) membuat kedua negara bertekad untuk menegakkan visi FOIP.

Perjanjian RAA dibentuk untuk meningkatkan interoperabilitas antara Australian Defence Force (ADF) dan Japan Self-Defence Forces (JSDF) di seluruh domain udara, laut, dan darat. Baik itu berupa pelatihan militer bersama, manuver militer, atau bahkan operasi bantuan bencana, RAA membuka jalan untuk kerja sama yang lebih lancar antara kedua negara.<sup>7</sup> Dari penjelasan di atas bisa ditarik permasalahan bahwa Jepang yang selama 60 tahun terakhir, hanya mempercayai AS untuk mengoperasikan pangkalan militernya, mulai membuka diri dengan negara lain di luar Amerika Serikat. Fenomena ini merupakan pertama kalinya bagi Jepang untuk bekerja sama dengan kekuatan militer di luar AS yakni Australia. Fenomena pembentukan perjanjian RAA antara Jepang dan Australia sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena perjanjian-perjanjian Jepang dan Australia sebelumnya tidak sedalam dan sekuat perjanjian RAA ini.

Dari penjabaran pada latar belakang tersebut, penulis mengangkat suatu permasalahan untuk diteliti “apa yang menjadi motif Jepang menandatangani perjanjian *Reciprocal Access Agreement* Jepang – Australia?”. Berdasarkan rumusan masalah yang penulis rumuskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif Jepang menandatangani perjanjian *Reciprocal Access Agreement*.

Michael Heazle & Yuki Tatsumi dalam jurnal yang berjudul “*Explaining Australia–Japan*

*security cooperation and its prospects: ‘the interests that bind?’”*, memuat tentang faktor pendorong dan prospek kerjasama keamanan lebih lanjut dalam hubungan bilateral Australia – Jepang.<sup>8</sup> David Scott dalam jurnal yang berjudul “*The Geoeconomics and Geopolitics of Japan’s ‘Indo-Pacific’ Strategy*”, berargumen bahwa strategi Jepang di Indo-Pasifik adalah strategi yang secara eksplisit berupaya untuk memperluas kehadiran Jepang di seluruh Indo-Pasifik, secara terbuka dan eksplisit memperoleh keamanan energi yang lebih besar, dan secara diam – diam dan implisit membatasi Tiongkok.<sup>9</sup> Arief Bakhtiar Darmawan dalam jurnal yang berjudul “*Japan’s Balanced Strategy to Face Tiongkok’s Threat in South Tiongkok Sea Dispute*”, menganalisis kebijakan luar negeri Jepang terkait sengketa di Laut Cina Selatan.<sup>10</sup> Berbeda dengan penelitian terdahulu sebelumnya, penelitian ini berfokus pada motif Jepang menandatangani Perjanjian Akses Timbal Balik Jepang – Australia. Perjanjian akses timbal balik Jepang Australia sebagai bentuk upaya *balancing* terhadap Tiongkok.

Argumen utama dalam penelitian ini adalah motif Jepang menandatangani perjanjian Akses Timbal Balik (*Reciprocal Access Agreement*, RAA) sebagai bentuk upaya *balancing* akibat tingkat ancaman yang berasal dari Tiongkok. Berdasarkan teori *Balance of Threat* oleh Stephen M. Walt, tingkat ancaman suatu negara dapat dilihat dari empat aspek. Aspek pertama kekuatan, Tingkat pengeluaran militer Tiongkok yang mencapai dua digit membuat negara ini dianggap sebagai negara dengan kekuatan yang besar. Aspek kedua yaitu jarak. Secara geografis

6 Peter J. McDermott, “The Australia-Japan Defence and Security Relationship: Past, Present and Future”, Deakin University: 196.

7 H.D.P. Envall, “Australia-Japan defence deal: noteworthy, not newsworthy”, *The Interpreter*, 22 January, 2018, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-japan-defence-deal-noteworthy-not-newsworthy>.

8 Heazlea and Tatsumi, “Explaining Australia–Japan security cooperation and its prospects: ‘the interests that bind?’”, *The Pacific Review*.

9 David Scott, “The Geoeconomics and Geopolitics of Japan’s ‘Indo-Pacific’ Strategy”, *Journal of Asian Security and International Affairs*.

10 Arief Bakhtiar Darmawan, “Japan’s Balanced Strategy to Face China’s Threat in South China Sea Dispute”, November 12, 2022. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/download/35814/18646>.

Tiongkok dan Jepang sama-sama terletak di kawasan Asia Timur. Kedua negara hanya berjarak sekitar kurang lebih 3000 km. Ketiga, aspek kekuatan ofensif. Tiongkok sebuah negara yang memiliki kemampuan militer khusus. Negara ini telah mengembangkan misil hipersonik dan telah diuji coba untuk diluncurkan pada bulan Agustus 2021. Aspek penentu tingkat ancaman yang terakhir yaitu niatan agresif. Aspek ini dapat diamati dari kasus sengketa Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, Tiongkok juga mengklaim pulau Senkaku Jepang di laut Tiongkok Timur, dengan niatan agresif Tiongkok yang ingin merebut wilayah kedaulatan negara lain termasuk Jepang, akan menjadi penghalang terwujudnya misi Open Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

### Teori *Balance of Threat*

Teori *balance of threat* merupakan modifikasi dari teori *balance of power* milik Waltz. Teori *balance of threat* berargumen bahwa negara cenderung membentuk aliansi untuk menyeimbangkan diri terhadap ancaman. Menurut Walt, ketika terdapat suatu negara yang sangat mengancam, negara-negara dengan kekuatan yang besar akan cenderung melakukan *balancing* melawannya dari pada harus melakukan *bandwagoning*.<sup>11</sup> Menurut Walt terdapat empat aspek yang mempengaruhi tingkat ancaman yang dimiliki oleh suatu negara yaitu kekuatan, kedekatan geografis, kekuatan ofensif, dan niatan agresif. Kekuatan (*Power*) Pada dasarnya, negara dengan kekuatan yang besar akan mengancam negara lain karena mereka tidak dapat memastikan bagaimana negara dengan kekuatan besar tersebut menggunakan kekuatannya dan khawatir jika kekuatan tersebut akan digunakan dengan sesukanya. Oleh karena itu peningkatan kekuatan relatif

suatu negara pada satu titik tertentu akan membuat negara lain menyeimbangkannya. Kedekatan Geografis (*Proximity geography*). Suatu negara yang terletak lebih dekat dengan negara lain yang memiliki kekuatan besar akan merasa lebih terancam dibandingkan dengan negara yang terletak lebih jauh.

Kekuatan Ofensif (*Offensive Power*). Suatu negara akan lebih mengancam apabila memiliki kemampuan militer secara khusus seperti teknologi militer jarak jauh atau kapasitas politik seperti ideologi yang berpotensi untuk menular. Kemampuan tersebut dapat menjadi ancaman secara langsung terhadap integritas wilayah atau stabilitas politik negara lain yang kemudian mendorong negara tersebut untuk melakukan *balancing* melawannya. Sebaliknya, apabila suatu negara hanya menggunakan kemampuan militernya yang besar untuk melindungi dirinya dan tidak percaya diri untuk menyerang negara lain, maka niat negara lain untuk melakukan *balancing* cenderung kecil. Niatan Agresif (*Aggressive Intentions*). Suatu negara akan cenderung melakukan *balancing* ketika ia memandang negara lain memiliki niat agresif. Negara yang agresif akan sulit untuk dijinakkan, oleh karena itu negara - negara lain akan membentuk aliansi untuk menyeimbangkannya.

Selain tingkat ancaman, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi apakah suatu negara memilih untuk melakukan *balancing* atau *bandwagoning*.<sup>12</sup> Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah negara kuat atau lemah (*strong versus weak states*), ketersediaan sekutu (*the availability of allies*), dan faktor perang dan damai (*peace and war*). Pada umumnya negara yang lemah akan cenderung untuk melakukan *bandwagoning* daripada *balancing*. Hal ini terjadi karena negara yang lemah hanya akan memberikan sedikit bantuan kekuatan pada koalisi pertahanan dan justru

11 Stephen M. Walt, "Keeping the World "Off-Balance": Self-Restraint and U.S. Foreign Policy", (In *America Unrivaled: The Future of the Balance of Power*, 2020), 121-154.

12 Stephen M. Walt, "'Explaining Alliance Formation.' In *The Origins of Alliances*", (Cornell University Press, 1987), 29 - 32.

menimbulkan kemarahan yang besar dari negara yang mengancam. Meski demikian, ketika keputusan mereka dapat berkontribusi untuk menghasilkan kemenangan, maka mereka dapat bergabung dengan negara-negara yang lebih lemah dari negara yang mengancam untuk berkoalisi. Sebaliknya, negara-negara yang kuat akan cenderung berkoalisi dengan negara yang setara atau lebih lemah karena keputusan yang mereka buat dapat mengarah pada kemenangan.

Suatu negara juga akan cenderung melakukan *bandwagoning* ketika tidak memiliki sekutu. Meski demikian pernyataan tersebut tidaklah paten karena negara bisa saja memilih untuk melakukan *balancing* meskipun tidak ada sekutu, yaitu dengan cara mengerahkan kekuatan internalnya sendiri. Pada umumnya suatu negara memang mengandalkan kekuatan internalnya, namun dengan melihat adanya sekutu dipihaknya yang memiliki kepentingan yang sama, maka sikap *balancing* adalah sistem yang efektif dalam komunikasi diplomatik. Hal yang mempengaruhi pemilihan sikap *balancing* atau *bandwagoning* ditentukan oleh pada tahap apa ketegangan itu terjadi. Suatu negara akan cenderung memilih untuk mengambil sikap *balancing* pada tahap awal ketegangan, khususnya ketika keadaan masih damai untuk berupaya mengalahkan negara yang mengancam. Namun, ketika hasil dari ketegangan telah nampak dengan pasti, maka negara-negara yang melakukan *balancing* akan menyeberang mendukung negara yang memenangkan ketegangan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek yang terlibat dalam masalah. Data-data sekunder yang telah diperoleh kemudian

dianalisis dan diinterpretasikan sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka melalui pengumpulan sumber data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuasi kualitatif. Kuasi kualitatif dipilih karena dalam penelitian ini terdapat kecenderungan penggunaan teori. Teori digunakan sebagai alat untuk menganalisis dari rumusan masalah, pengumpulan data, hingga analisis data. Menurut Burhan Bungin mengartikan kuasi kualitatif sebagai kualitatif semu dimana teori sebagai dasar dari pengumpulan data.<sup>13</sup> Penggunaan teori dimungkinkan sebagai alat untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan suatu metode uji kredibilitas yang dilakukan dengan memeriksa berbagai informasi dan data yang telah dihimpun dari beberapa sumber, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan suatu kesimpulan terkait objek yang diteliti. dengan memeriksa data mengenai motif yang melatarbelakangi Jepang dalam menandatangani perjanjian *Reciprocal Acces Agreement* (RAA) yang diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti website resmi pemerintah Jepang, Australia dan Amerika Serikat, website berita, artikel jurnal dan berita online. Setelah terakumulasi, data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan yang mampu menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif.

## Motif Jepang Menandatangani *Reciprocal Access Agreement* (RAA)

Perjanjian Akses Timbal Balik (*Reciprocal Access Agreement*, RAA) antara Jepang dan Australia merupakan pendalaman dari kerja sama *Special Strategic Partnership* atau kemitraan

<sup>13</sup> Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif (2nd ed.)", (kencana, 2008).

strategis khusus. Perjanjian ini lebih dalam dari perjanjian – perjanjian Australia dan Jepang sebelumnya. RAA pada dasarnya menetapkan struktur hukum, logistik, dan keamanan untuk memfasilitasi akses timbal balik antara satu sama lain ke pelabuhan dan pangkalan. Perjanjian ini menguraikan protokol sesungguhnya yang mengatur penempatan personel dan aset militer dan sipil Jepang dan Australia di wilayah satu sama lain.<sup>14</sup> Selain itu, kedua negara bertekad untuk menegakkan visi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP).<sup>15</sup> RAA Jepang – Australia sederhananya mengatur tentang penempatan personil militer serta memberikan fasilitas di wilayah satu sama lain.

### *Tiongkok sebagai Ancaman*

#### Kekuatan Tiongkok

Kekuatan militer Tiongkok yang semakin besar membuat Jepang khawatir akan kekuatan tersebut, apabila digunakan dengan sesukanya. Kekhawatiran negara – negara barat mengalami peningkatan karena kenaikan Tiongkok dalam militernya, pada tahun 2000 pengeluaran pertahanan sekitar 3,7 miliar dollar dan meningkat hingga 166,1 miliar dollar pada 2012.<sup>16</sup> Tiongkok secara ekonomi sudah menjadi negara adidaya, sehingga peningkatan kekuatan militer menjadi sebuah kombinasi yang berbahaya. Negara – negara di wilayah Asia Pasifik, terutama yang memiliki perselisihan teritorial dengan Tiongkok, pembangunan Tiongkok menjadi negara adidaya militer dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional mereka.

Akibatnya, terjadi perlombaan senjata dapat

14 Thomas Wilkins, "Enhancing the "Special Strategic Partnership": Australia and Japan Sign Reciprocal Access Agreement", " International Information Network Analysis, 2022.

15 RFA, "Japan, Australia sign defense pact seen as response to China", Washinton Dc, January 06, 2022, <https://www.rfa.org/english/news/china/japan-australia-01062022150332.html>.

16 Nora Vanaga, "China's Military Rise: The Lack of Transparency and Internal Political Uncertainty", Latvia: National Defence Academy of Latvia Center for Security and Strategic Research 1, (2014).

diamati di wilayah tersebut. Jepang dan Korea Selatan telah secara signifikan meningkatkan pengeluaran pertahanan karena hubungannya yang tegang dengan Tiongkok.

Tiongkok telah lama menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia, namun pada 2023 menurut perkiraan PBB Tiongkok telah diambil alih oleh India. Pada 2021 jumlah penduduk Tiongkok mencapai 1.412,6 juta jiwa, menurun pada 2022 sebanyak 850.000 jiwa dan pada 2023 turun 2,08 juta jiwa.<sup>17</sup> Populasi Tiongkok mengalami penyusutan pada 2022 merupakan yang pertama kalinya dalam lebih dari 60 tahun, hal itu disampaikan oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok. Selama periode 2013-2021 kontribusi Tiongkok terhadap pertumbuhan ekonomi global rata-rata sekitar 38,6 persen, lebih tinggi dari gabungan negara-negara G7 menurut data Bank Dunia.<sup>18</sup> Dari tahun 2013 sampai 2021, PDB Tiongkok tumbuh dari 53,9 triliun yuan menjadi 114,4 triliun yuan. Pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 6,6 persen, mengalahkan pertumbuhan global sebesar 2,6 persen. Pendapatan nasional bruto per kapita Tiongkok mencapai \$11,890 pada tahun 2021 meningkat dua kali lipat pada tahun 2012. Ketika pandemi Covid-19 PDB Tiongkok pada tahun 2021 menyumbang 18,5 persen terhadap perekonomian dunia, naik 7,2 poin persentase selama sepuluh tahun terakhir, serta perdagangan barang luar negeri Tiongkok menyumbang 13,5 persen dari PDB dunia.<sup>19</sup> Tiongkok telah menjadi mitra dagang utama lebih dari 140 negara dan wilayah, memimpin dunia dalam total volume perdagangan barang. Berdasarkan data diatas yang sudah dijabarkan, kekuatan (*power*) yang

17 Statista, January 17, 2024, <https://www.statista.com/statistics/270129/population-growth-in-china/>.

18 Bmz.de, "What is the G7 and how does it operate?", Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, <https://www.bmz.de/en/news/g7-presidency/what-is-the-g7-104148>.

19 Xinhua, English.Gov.cn, October 27, 2022, [https://english.www.gov.cn/news/topnews/202210/27/content\\_WS6359c2b3c6d0a757729e1d01.html](https://english.www.gov.cn/news/topnews/202210/27/content_WS6359c2b3c6d0a757729e1d01.html).

dimiliki Tiongkok berasal dari segi ekonomi serta populasi penduduk Tiongkok yang besar. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, serta populasi yang besar merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Tiongkok.

Menurut data tahunan SIPRI (SIPRI *Military Expenditure Database 2022*) Tiongkok pada tahun 2022 mengalokasikan sekitar \$292 miliar untuk militernya.<sup>20</sup> Jumlah tersebut 4,2 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, dan 63 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Pengeluaran militer Tiongkok meningkat berturut-turut selama 28 tahun, periode pertumbuhan belanja terpanjang tanpa henti yang pernah dicapai oleh negara manapun. Tingkat pertumbuhan sebesar 4,2 persen pada tahun 2022 merupakan tingkat pertumbuhan tahunan terendah kedua yang dicatat oleh Tiongkok sejak tahun 1995. Tingkat pertumbuhan terendah pada periode tersebut terjadi pada tahun 2021. Hal itu karena pada kedua tahun tersebut Tiongkok mendapat tantangan ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan ketat nol covid yang berakhir pada Desember 2022. Namun, belanja 38 militer Tiongkok tetap stabil pada angka 1,6 persen dari PDB pada tahun 2022, sejalan dengan kisaran yang relatif stabil pada dekade terakhir yaitu sebesar 1,6 - 1,8 persen dari PDB.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan yang rendah mencerminkan kemerosotan ekonomi dibandingkan perubahan anggaran. lain. Dari data yang sudah di paparkan diatas indikator kekuatan Tiongkok diukur dari segi ekonomi, jumlah penduduk, serta pengeluaran militer yang berasal dari Tiongkok. Oleh karena itu, Tiongkok dengan kekuatan yang dimiliki dapat menjadi sebuah ancaman oleh negara lain jika dilihat dari segi ekonomi, jumlah penduduk dan pengeluaran militernya

20 SIPRI *Military Expenditure Database*, "Trends In World Military Expenditure", 2022.

21 SIPRI, "Trends In World"

### Kedekatan Geografis

Berdasarkan letak geografisnya negara yang dekat dengan Jepang serta memiliki kekuatan besar adalah Tiongkok. Menurut laman Geodatos, jarak antar 43 titik tengah kedua negara adalah sejauh 3054 km. Sedangkan jarak terpendek yang dihitung dari perbatasan utama termasuk pulau-pulau besar adalah 603 km.<sup>22</sup> Jarak ini merupakan jarak melalui laut yang bisa ditempuh oleh kapal perusak milik Tiongkok dalam waktu kurang dari 11 jam.<sup>23</sup> Pada maret 2021, kapal perusak tipe 055 yang merupakan kapal terbesar itu untuk pertama kalinya berlayar melalui Selat Tsushima dan menuju ke laut Jepang. Kapal Perusak 055 yang telah memasuki Laut Jepang menunjukkan bahwa memperoleh kemampuan berpatroli di wilayah laut yang jauh, dan menjadi indikasi kemajuan Angkatan Laut PLA.

Rudal jelajah milik Tiongkok jenis CSS-5 atau DF 21, DF-17, CJ-10, H-6 dapat mencakup semua wilayah Jepang hanya dalam hitungan menit.<sup>24</sup> DF 21 atau CSS 5 merupakan jenis rudal balistik jarak menengah atau (*Medium Range Ballistic Missile*, MRBM) yang dapat bergerak di jalan raya. Rudal jenis ini merupakan yang pertama dimiliki Tiongkok yang menggunakan bahan bakar padat dan sudah beroperasi sejak 1999. Jangkauan rudal balistik DF 21 adalah 1800 km dan dapat mengerahkan muatan seberat 600 kg. DF 21 dapat ditembakkan dengan cepat dengan waktu peluncuran hanya beberapa menit.<sup>25</sup> DF 21 dapat membawa hulu ledak nuklir atau konvensional dan dengan jangkauan 1800 km

22 Geodatos, March 4, 2024, <https://www.geodatos.net/en/distances/countries/from-japan-to-china>.

23 Jurgis Bekampis, "China's Rising Military Threat in the Indo-Pacific Region: Change in Japan's Defence Policy in 2013-2022", 2023, *Lithuanian Annual Strategic Review 2023 Volume 21*: 52.

24 Jurgis, "China's Rising Military Threat"

25 David Webb, "Dong Feng-21 (CSS-5)", *missiledefenseadvocacy.org*, February, 2017, <https://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/china/dong-feng-21-css-5/>.

dapat menjangkau Jepang.<sup>26</sup> Oleh karena itu, Jepang dapat menjadi target dari Rudal DF 21 milik Tiongkok karena jangkauannya yang dapat mencapai wilayah Jepang, serta dapat meluncur hanya dengan hitungan menit.

DF 17 memiliki jangkauan 1800 – 2500 km dan rudal pertama yang dirancang oleh Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat untuk penyebaran operasional kendaraan luncur hipersonik.<sup>27</sup> Dengan jangkauannya yang mencapai 2500 km, DF 17 dapat mencapai Jepang dan menantang sistem pertahanan rudalnya. CJ 10 disebut juga dengan DH 10 dan DF 10, merupakan sebuah rudal jelajah serangan darat (*land attack cruise missile*, LACM). CJ 10 merupakan rudal jelajah Tiongkok yang berpotensi memiliki kemampuan nuklir, yang diperkirakan memiliki jangkauan 1500 km.<sup>28</sup> Empat pulau utama Jepang yaitu Honsu, Shikoku, Hokkaido dan Kyushu juga berada dalam jangkauan serangan rudal jelajah serangan darat (LACM).

Kedekatan geografis dengan jarak terpendek kedua negara 603 km dapat dijangkau oleh rudal jelajah milik Tiongkok dengan mudah. Sehingga kedekatan geografis serta senjata Tiongkok yang canggih yang memiliki jangkauan luas, akan membuat negara – negara di sekitarnya merasa terancam, khususnya Jepang. Dari pemaparan di atas terkait senjata yang dimiliki Tiongkok dan jangkauannya dapat membuat Jepang menjadi target sasaran Tiongkok. Hal itu mungkin saja bisa terjadi karena antara Tiongkok dan Jepang memiliki sengketa wilayah di Laut

Tiongkok Timur yaitu Kepulauan Senkaku. Kedekatan geografis serta sengketa wilayah antara Jepang dan Tiongkok memungkinkan Tiongkok untuk melakukan tindakan agresif untuk memperkuat klaim kedaulatan atas Kepulauan Senkaku.

### Kekuatan Ofensif Tiongkok

Kekuatan ofensif hampir sama penjelasannya dengan power, yaitu suatu negara akan lebih mengancam apabila memiliki kemampuan militer secara khusus seperti teknologi militer jarak jauh. Berdasarkan aspek kekuatan ofensif, Tiongkok memang sebuah negara yang memiliki kemampuan militer khusus. Negara ini telah mengembangkan misil hipersonik dan telah diuji coba untuk diluncurkan. Kekuatan militer Tiongkok yang semakin besar menjadikan Tiongkok sebagai ancaman keamanan utama bagi Jepang, hal ini menurut dari tinjauan pertahanan tahunan Tokyo pada 2019.<sup>29</sup> Pada 9 Januari 2014, pers pertahanan melaporkan bahwa Tiongkok melakukan uji coba pertama kendaraan luncur hipersonik baru atau (*hypersonic glide vehicle*, HGV), kendaraan tersebut diluncurkan di atas rudal balistik antarbenua atau (*intercontinental ballistic missile*, ICBM). Kendaraan luncur hipersonik dapat meluncur dan bermanuver dengan memiliki kecepatan antara Mach 5 dan Mach 10, atau hingga 10 kali kecepatan suara.<sup>30</sup> Tiongkok telah membuat kemajuan yang signifikan menuju kekuatan luar angkasa militer yang serius melalui uji coba HGV.

Tiongkok memiliki strategi kontra intervensi yang bertujuan untuk membatasi

26 Hirofumi Tosaki, “Nuclear arms control in a post-INF Treaty period: a chance to engage China?”, The Japan Institute of International Affairs, March 19, 2019, [https://www2.jiia.or.jp/en/article\\_page.php?id=18](https://www2.jiia.or.jp/en/article_page.php?id=18).

27 Missile Defense Advocacy Alliance, “Dong Feng-17”, [missiledefenseadvocacy.org](https://missiledefenseadvocacy.org), January 13, 2023, <https://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/china/dong-feng-17/>.

28 Missile Defense Advocacy Alliance, “DH-10 / CJ-10”, [missiledefenseadvocacy.org](https://missiledefenseadvocacy.org), January 2023, <https://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/china/dh-10-cj-10/>.

29 Tim Kelly, “Japan lists China as bigger threat than nuclear-armed North Korea”, Reuters, September 27, 2019, <https://www.reuters.com/article/us-japan-defence/japan-promotes-china-as-bigger-threat-than-nuclear-armed-north-korea-idUSKBN1WC051/>.

30 Benjamin Schreer, “The strategic implications of China’s hypersonic missile test”, The Strategist – The Australian Strategic Policy Institute, January 28, 2014, <https://www.aspi.org.au/the-strategic-implications-of-chinas-hypersonic-missile-test/>.

kehadiran AS di wilayah pinggirannya dan membatasi akses di kawasan Indo Pasifik yang lebih luas. Kontra intervensi Tiongkok dikenal juga sebagai kemampuan anti akses atau penolakan wilayah (A2/AD), yang diperkuat dengan program pengembangan senjata dan klaim teritorial. Tujuan dari kontra intervensi Tiongkok adalah menghalangi intervensi.<sup>31</sup> Kemampuan bersama untuk kontra intervensi Tiongkok terdapat beberapa strategi yaitu, serangan presisi jarak jauh, sistem pertahanan udara terpadu (*Integrated Air Defense System*, IADS), pertahanan rudal balistik dan jelajah, dan senjata hipersonik.

Tiongkok memiliki *People's Liberation Army Navy* (PLAN) yang memiliki kapal selam serang bertenaga nuklir dan kapal perusak. Kapal selam serang bertenaga nuklir Type 093 membawa rudal jelajah anti kapal YJ 18 yang diluncurkan oleh kapal selam tersebut. PLAN saat ini memiliki 6 kapal selam serang bertenaga nuklir kelas Shang, Shang I tipe 093, Shang II Tipe 093A, Shang III Tipe 093B.<sup>32</sup> Menurut laporan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Tiongkok melengkapi kapal selam rudal balistik (*ballistic missile submarines*, SSBNs) bertenaga nuklirnya dengan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (*submarine launched ballistic missile*, SLBM) JL 3 yang memiliki kecanggihan mampu menargetkan benua AS. JL 3 memiliki jangkauan lebih dari 10.000 km, diuji coba pertama pada November 2018 yang diharapkan mampu mengirimkan hulu ledak nuklir. Kekuatan militer Tiongkok dengan jangkauan JL 3 memungkinkan PLAN untuk menargetkan AS dari benteng pertahanan

nuklir yang dekat pantai Tiongkok, seperti Laut Tiongkok Selatan dan Teluk Bohai.<sup>33</sup>

Tiongkok memiliki rudal balistik antar benua (*Intercontinental Ballistic Missile*, ICBM) yaitu Rudal ICBM Type DF-41. DF-41 membawa 18 hulu ledak pada peringatan hari ulang tahun Tiongkok ke 70 pada Oktober 2019.<sup>34</sup> DF-41 memiliki jangkauan 12.000-15.000 km yang dapat menargetkan setengah dari seluruh benua Amerika.<sup>35</sup> Suatu negara akan lebih mengancam apabila memiliki kemampuan militer secara khusus seperti teknologi militer jarak jauh merupakan definisi dari kekuatan ofensif. Dalam hal ini, Tiongkok memiliki teknologi militer khusus seperti kepemilikan kendaraan luncur hipersonik atau HGV yang diluncurkan dari rudal balistik antarbenua atau (ICBM), kepemilikan kontra intervensi atau disebut kemampuan anti akses atau penolakan wilayah (A2/AD), kapal selam serang bertenaga nuklir yang memiliki jangkauan lebih dari 10.000 km. Kepemilikan teknologi militer khusus yang dimiliki oleh Tiongkok dapat dijadikan aspek yang mempengaruhi tingkat ancaman kekuatan ofensif oleh Tiongkok.

### Intensi Agresif

Jepang memandang Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan militer besar yang agresif dan berpotensi mengancam keamanan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok dan Jepang memiliki permasalahan sengketa kepulauan di Laut Tiongkok Timur, baik Jepang maupun Tiongkok mengklaim

31 Matthew Jamison, "Countering China's Counter-Intervention Strategy", [thestrategybridge.org](https://thestrategybridge.org/the-bridge/2020/8/11/countering-chinas-counter-intervention-strategy), August 11, 2020, <https://thestrategybridge.org/the-bridge/2020/8/11/countering-chinas-counter-intervention-strategy>.

32 Naval Technology, "Shang-Class Nuclear-Powered Attack Submarines, China", Naval Technology, February 17, 2023, <https://www.naval-technology.com/projects/shang-class-nuclear-powered-attack-submarines-china/>.

33 Luke Caggiano, "China Deploys New Submarine-Launched Ballistic Missiles", [armscontrol.org](https://www.armscontrol.org/act/2023-05/news/china-deploys-new-submarine-launched-ballistic-missiles), May 2023, <https://www.armscontrol.org/act/2023-05/news/china-deploys-new-submarine-launched-ballistic-missiles>.

34 Missile Defense Advocacy Alliance, "Dong Feng-41(CSS-X-20)", [missiledefenseadvocacy.org](https://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/china/df41/), January 2023, <https://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/china/df41/>.

35 Bill Gertz, "China Tests New ICBM from Railroad Car", *The Washington Free Beacon*, December 21, 2015, <https://freebeacon.com/national-security/china-tests-new-icbm-from-railroad-car/>.

serangkaian pulau di wilayah tersebut.<sup>36</sup> Pulau yang disebut Jepang sebagai Senkaku dan Diaoyu oleh Tiongkok. Hubungan Tiongkok dan Jepang semakin menegangkan terkait Kepulauan Senkaku sejak Jepang membeli tiga dari lima pulau pada tahun 2012. Jepang membeli 3 dari 5 pulau yang berada di Kepulauan Senkaku dari pemilik swasta dengan harga USD 26,2 juta.<sup>37</sup> Sebelumnya, hingga 2010 kedua negara berusaha menjaga hubungan agar tetap tenang dan melakukan upaya yang terbaik untuk menangani gejolak yang kadang terjadi secara diam - diam. Tokyo memberikan kebijakan ketat melarang siapapun selain pejabat negara untuk berada di Kepulauan Senkaku.

Dalam laporan CSIS tahun 2016 menuliskan yang lebih mengkhawatirkan dalam jangka panjang adalah kapal Tiongkok yang berpatroli di sekitar Kepulauan Senkaku ukurannya terus meningkat. Data yang dikeluarkan oleh CCG, kapal Tiongkok yang dikirim ke Senkaku pada 2014 memiliki bobot sekitar 2200 ton, dan produksinya meningkat menjadi lebih dari 3200 ton. Haijing 2901 sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok (CCG) baru yang memiliki berat lebih dari 10.000 ton dikerahkan ke Laut Tiongkok Timur pada 2015, dan diperkirakan akan berpartisipasi untuk patroli di sekitar Kepulauan Senkaku di masa depan.<sup>38</sup> Kapal jenis Haijing 2901 merupakan kapal terbesar di dunia dan hanya dapat disaingi oleh kapal kembarnya Haijing 3901 yang berpatroli di Laut Tiongkok Selatan dalam beberapa tahun mendatang.

36 Nyshka Chandran, "A second territorial dispute in Asia could be more dangerous than the South China Sea", CNBC, December 20, 2017, <https://www.cnbc.com/2017/12/20/east-china-sea-could-be-riskier-than-south-china-sea.html>.

37 Linus Hagström, "China-Japan tensions over Senkaku purchase an orchestrated affair", East Asia Forum, September 17, 2012, <https://eastasiaforum.org/2012/09/17/china-japan-tensions-over-senkaku-purchase-an-orchestrated-affair/>.

38 Asia Maritime Transparency Initiative, "East China Sea Tensions: Approaching a Slow Boil", [amti.csis.org](http://amti.csis.org), April 14, 2016, <https://amti.csis.org/east-china-sea-tensions/>.

Laporan dari *Ministry of Foreign Affairs of Japan* pada 2016, melaporkan status aktivitas kapal pemerintah dan kapal penangkap ikan milik Tiongkok di perairan sekitar Kepulauan Senkaku. Pada 26 Agustus 2016 sebanyak 15 kapal pemerintah Tiongkok memasuki zona tambahan dan total ada 36 kapal milik Tiongkok menyusup ke perairan teritorial Jepang. Dalam laporan Mofa Jepang 2016 Tiongkok mengerahkan 3 kapal miliknya yang dikerahkan di zona tambahan di Kepulauan Senkaku, dan 4 atau 5 kapal pemerintah Tiongkok dikerahkan ke wilayah sekitar Beting Scarborough di Laut Tiongkok Selatan. Namun, Kapal milik Tiongkok yang dikerahkan di sekitar wilayah Kepulauan Senkaku jauh lebih banyak dibandingkan angka di atas.<sup>39</sup> Jepang telah memberikan peringatan kepada Tiongkok untuk tidak melakukan penyusupan di perairan teritorial Jepang, setiap kali kapal Tiongkok menyusup ke perairan Jepang, Jepang mengambil tindakan langsung seperti meminta kapal yang menyusup untuk pergi dan memberikan sikap yang tenang dan tegas.

Pada tahun 2020 aktivitas Penjaga Pantai Tiongkok (*China Coast Guard/CCG*) di perairan sekitar Kepulauan Senkaku meningkat secara signifikan dengan total 1161 kapal, hal itu merupakan aktivitas tertinggi sepanjang masa. Menurut statistik Jepang, kapal CCG selama 333 hari di tahun 2020 muncul di zona tambahan Kepulauan Senkaku, tepat diluar perairan teritorial. Penyusupan dilakukan oleh kapal CCG ke perairan teritorial selama 29 hari, dan berada disana selama 57 jam pada bulan Oktober, hal itu merupakan penerobosan terlama. Selain itu, kapal CCG terlibat enam kejadian dimana kapal nelayan Jepang didekati dan diganggu oleh CCG yang berada di wilayah

39 Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Status of activities by Chinese government vessels and Chinese fishing vessels in waters surrounding the Senkaku Islands", Japan: [mofa.go.jp](http://mofa.go.jp), August 26, 2016, <https://www.mofa.go.jp/files/000180283.pdf>.

perairan sekitar Kepulauan Senkaku.<sup>40</sup> Setiap kali Tiongkok melakukan aktivitas yang seolah seperti penegakan hukum yang menargetkan kapal – kapal Jepang, serta tetap berada di perairan teritorial Jepang, hal itu tidak dapat disebut sebagai lintas damai, dan pemerintah Jepang sering melakukan protes melalui jalur diplomatik.

### *Australia sebagai Mitra Balancing*

#### Kekuatan Militer Jepang

Kemunculan Jepang sebagai kekuatan militer global didukung oleh peningkatan kemampuan *Japan Self Defense Force* (JSDF) secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, JSDF berusaha meningkatkan kemampuannya dengan mengedepankan pada teknologi dan alutsista yang canggih untuk memperoleh kekuatan yang mobile dan fleksibel. Selain itu, peningkatan kehadiran militer Jepang diperkuat oleh niat strategis dan politik untuk memanfaatkan kemampuan militernya demi tujuan keamanan internasional. Pada pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dari tahun 2012 hingga 2020, ketika menciptakan Strategi Keamanan Nasional (NSS) yang pertama di Jepang, terkenal dengan mencetuskan konsep kontribusi aktif terhadap perdamaian.<sup>41</sup> Konsep kontribusi aktif terhadap perdamaian di lanjutkan kembali oleh Pemerintahan Yoshihide Suga hingga 2021. Hal itu juga didukung oleh menteri luar negeri selama masa jabatannya hingga sekarang menjadi Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Kishida berjanji untuk

menaikkan PDB untuk keamanan nasional menjadi 2 persen.<sup>42</sup> Konsep kontribusi aktif dicetuskan oleh PM Abe dan dilanjutkan oleh PM selanjutnya hingga saat ini.

Pasukan Bela Diri Jepang menurut buku putih pertahanan 2021 terdiri dari 232.509 personel militer. Terbagi dalam angkatan darat 141.443, angkatan udara 43.830, dan angkatan laut 43.419 personel. Biaya yang dikeluarkan untuk pertahanan semakin meningkat, pada 2022 mencapai 42 miliar euro. Biaya pertahanan yang dikeluarkan Jepang pada 2022 juga termasuk terbesar ke tujuh di dunia menurut *Global Firepower Index*.<sup>43</sup> Pada 2021 Angkatan Darat Pasukan Bela Diri Jepang dilaporkan mengakuisi satu kapal berukuran sedang dengan berat 2000 ton dan dua kapal berukuran kecil dengan berat 400 ton pada 2024.<sup>44</sup> Kemunculan Jepang untuk mempersenjatai Pasukan Bela Diri Jepang disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling terlihat adalah karena meningkatnya kehadiran militer asing di wilayah sekitar Jepang. Militer Tiongkok sering beroperasi di perairan dan wilayah udara Jepang. Selain itu, kemajuan teknologi militer Tiongkok semakin cepat dan meningkatnya persenjataan rudal di Asia Timur Laut yang lebih cepat, akurat dan tidak mudah dideteksi memperdalam rasa kerentanan Jepang.<sup>45</sup> Selama beberapa waktu, Jepang menekankan pada pertahanan rudal balistik, namun karena jumlahnya yang

40 Kentaro Furuya, "The China Coast Guard Law and Challenges to the International Order – Implications for CCG Activity around the Senkaku Islands", The Sasakawa Peace Foundation, March 8, 2021, [https://www.spf.org/iina/en/articles/furuya\\_03.html](https://www.spf.org/iina/en/articles/furuya_03.html).

41 Christopher W. Hughes, "Japan as a Global Military Power New Capabilities, Alliance Integration, Bilateralism-Plus", Cambridge University Press, August 26, 2022, <https://www.cambridge.org/core/elements/japan-as-a-global-militarypower/839164B08927CCA1BC48586FB64B578C>.

42 Sheila A. Smith, "How Japan Is Doubling Down on Its Military Power", Council on Foreign Relations, December 20, 2022, <https://www.cfr.org/article/how-japan-doubling-down-its-military-power>.

43 Marjorie Vanbaelinghem and Alice Ortega, "The Japanese and Their Self-Defence Forces Today", Institut De Recherche Strategique De L'ecole Militaire, Research Paper- No. 127, May 23, 2022.

44 Christopher W. Hughes, "Japan as a Global Military Power New Capabilities, Alliance Integration, Bilateralism-Plus", Cambridge University Press, August 26, 2022, <https://www.cambridge.org/core/elements/japan-as-a-global-militarypower/839164B08927CCA1BC48586FB64B578C>.

45 Sheila A. Smith, "How Japan Is Doubling Down on Its Military Power", Council on Foreign Relations, December 20, 2022, <https://www.cfr.org/article/how-japan-doubling-down-its-military-power>.

semakin banyak di wilayah tersebut, membuat Jepang tidak mungkin hanya mengandalkan pertahanan tersebut.

### Kekuatan Militer Australia

Australia merupakan negara dengan kekuatan menengah di Asia yang sedang berkembang. Australia menghadapi resiko yang lebih besar terhadap masa depan kawasan Indo Pasifik sebagai akibat dari semakin ketatnya persaingan strategis antara Tiongkok yang sedang berkembang dengan Amerika Serikat. Australia tidak tinggal diam, melalui belanja pertahanan Australia menaikkan anggaran dari sebelumnya 1,5 persen PDB pada 2013, menjadi 2 persen PDB pada 2020.<sup>46</sup> Pada tahun 2021, anggaran pendanaan pertahanan mencapai \$44,6 miliar. Menurut data pertahanan, industri pertahanan Australia menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pengeluaran peralatan militer lokal untuk pertahanan meningkat 35 persen menjadi \$3,5 miliar.<sup>47</sup> Selama beberapa tahun mendatang, Australia akan menghabiskan antara \$30 miliar dan \$42 miliar untuk kendaraan lapis baja. Pengeluaran ini akan mencakup armada kendaraan tempur infanteri dengan biaya antara \$18 miliar dan \$27 miliar. Kendaraan pertama akan dikirimkan ke Australia pada 2024 dan dioperasikan pada tahun 2025.<sup>48</sup> Pemerintah Australia melakukan pendanaan kepada Departemen Pertahanan untuk anggaran tahun 2022- 2023 berjumlah \$48,6 miliar.<sup>49</sup>

46 Andrew Carr, "NO LONGER A MIDDLE POWER Australia's Strategy in the 21st Century", The Institut francais des relations internationales (ifri): 10, September 2019.

47 Dr Marcus Hellyer, "The cost of Defence ASPI defence budget brief 2021-2022", Australian Strategic Policy Institute Download, May 26, 2021, <https://www.aspi.org.au/report/cost-defence-aspi-defence-budget-brief-2021-2022>.

48 Anthony Galloway, "Australia commits to \$3.5 billion tank purchase from the US", The Sydney Morning Herald, January 10, 2022, <https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-commits-to-3-5-billion-tank-purchase-from-the-us-20220109-p59mub.html>.

49 Brangwin and Watt, "The state of Australia's defence:

Dari data di atas, menurut faktor negara kuat atau lemah, negara kuat akan cenderung berkoalisi dengan negara yang setara atau lebih lemah karena keputusan yang mereka buat dapat mengarah pada kemenangan. Dalam hal ini Jepang merupakan negara yang kuat secara militer. Jepang memiliki perlengkapan militer yang lebih banyak dan canggih dibandingkan Australia. Jepang sebagai negara kuat melakukan *balancing* dengan Australia dengan perlengkapan militer yang ia punya akan memperkuat Jepang dan Australia untuk menghadapi ancaman ke depan.

### Kekuatan Internal Jepang dan Australia

Jepang memiliki kekuatan internal yang dilihat dari segi militer dapat menjadi tawaran untuk Jepang melakukan *balancing* dengan Australia. Meskipun militer Jepang berada di bawah Tiongkok, akan tetapi militer Jepang lebih kuat dari militer Australia. Hal itu terbukti dari Jepang yang berada di posisi kelima negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia jauh di atas Australia.<sup>50</sup> Menurut laporan SIPRI, dalam belanja militer tahun 2021, Pemerintah Jepang menambahkan belanja militer senilai \$7 miliar, hasilnya pengeluaran meningkat 7,3 persen menjadi \$54,1 miliar. Pengeluaran tersebut merupakan peningkatan tertinggi sejak tahun 1972. Sedangkan belanja militer Australia pada tahun 2021 meningkat 4 persen menjadi \$31,8 miliar.<sup>51</sup> Dari data di atas Jepang lebih besar pengeluaran belanja militer dibandingkan Australia dan militer

a quick guide", Parliament of Australia, July 27, 2022, [https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_departments/Parliamentary\\_Library/Research/Quick\\_Guides/2022-23/StateofAustraliasDefence](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_departments/Parliamentary_Library/Research/Quick_Guides/2022-23/StateofAustraliasDefence).

50 Marjorie Vanbaelinghem and Alice Ortega, "The Japanese and Their Self-Defence Forces Today", Institut De Recherche Strategique De L'ecole Militaire, Research Paper- No. 127, May 23, 2022.

51 Stockholm International Peace Research Institute, "World military expenditure passes \$2 trillion for first time", SIPRI Military Expenditure Database, April 25, 2022, <https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time>.

Jepang menduduki peringkat lima besar didunia yang berarti lebih kuat dibandingkan militer Australia.

Dari segi basis industri pertahanan, menurut Ministry of Defense (MOD) basis industri pertahanan terdiri dari basis manusia, fisik dan teknologi yang penting untuk produksi, operasi, pemeliharaan peralatan pertahanan untuk kegiatan Pasukan Bela Diri Jepang atau MOD. Menurut data SIPRI pada 2023, tiga perusahaan Jepang terdaftar dalam 100 perusahaan teratas dalam penjualan senjata pada tahun 2021 di Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yaitu perusahaan Mitsubishi Heavy Industries peringkat ke 35, Kawasaki Heavy Industries peringkat 57, dan Fujitsu peringkat 77. Sedangkan perusahaan Australia hanya masuk satu perusahaan dari 100 perusahaan teratas dalam penjualan senjata, yaitu perusahaan Austal peringkat 95.<sup>52</sup> Berdasarkan data tersebut, Jepang termasuk unggul dalam jumlah perusahaan yang melakukan penjualan senjata pada 2021, dibandingkan dengan Australia.

Dari segi kepemilikan senjata pertahanan, Jepang memiliki rudal SM-3 Block IIA yang dikembangkan dari kerjasama dengan salah satu kontraktor pertahanan dalam negeri Mitsubishi Heavy Industries (MHI) dan Raytheon Missile Systems milik Amerika. SM 3 Block IIA memiliki kemampuan melawan ancaman sekelas rudal balistik antar benua (ICBM).<sup>53</sup> Sedangkan Australia baru mengumumkan pada 2017 bahwa sembilan fregat baru Australia akan mulai dibangun pada tahun 2020. Sembilan fregat baru tersebut akan dilengkapi dengan sistem Aegis dan berkemampuan BMD. Selain itu, pada

2017 Australia masih akan berencana untuk meningkatkan kapal perusak kelas Hobar menjadi Aegis Baseline 9 dan melengkapinya dengan pencegat SM-6.<sup>54</sup> Dari data di atas Jepang memiliki senjata yang lebih canggih dibandingkan dengan Australia. Jepang memiliki rudal balistik pencegat pertahanan yang dapat melawan ancaman sekelas rudal balistik antar benua atau ICBM. Sedangkan Australia baru akan memproduksi tahun 2020, dan dengan kemampuan terbatas melawan rudal balistik jarak pendek dan menengah.

Data yang disajikan di atas merupakan kekuatan internal yang dimiliki Jepang dan Australia sebagai bahan perbandingan untuk Jepang menawarkan diri terhadap Australia. Dari data yang sudah ada di atas dapat dianalisis, Jepang memiliki kekuatan internalnya seperti pengeluaran militer Jepang yang lebih besar dari Australia. Jepang juga merupakan negara terbesar ke lima di dunia dalam hal kekuatan militernya yang cukup jauh di atas Australia. Selain itu, Jepang juga memiliki senjata pertahanan yang lebih modern dan belum dimiliki Australia, hal itu dapat menjadi tawaran untuk Jepang terhadap Australia untuk melakukan kerja sama. Namun, tidak cukup hanya dengan mengerahkan kekuatan internalnya, negara dapat melakukan *balancing* ketika melihat ada sekutu yang memiliki kepentingan yang sama dengannya.

#### Kepentingan Bersama Jepang dan Australia

Dalam hal ini Jepang dan Australia memiliki kepentingan yang sama, kedua negara menganggap Tiongkok sebagai ancaman. Karena kepentingan yang sama maka kedua negara memilih untuk *balancing*. Menurut tinjauan pertahanan tahunan Jepang pada September 2019, kekuatan militer Tiongkok

52 Xiao Liang and Lorenzo Scarazzato, eds., "The Sipri Top 100 Armsproducing And Military Services Companies, 2022", SIPRI's Military Expenditure and Arms Production Programme, December 2023.

53 Missile Defense Project, "Standard Missile-3 (SM-3)," Missile Threat, Center for Strategic and International Studies, June 14, 2016, last modified March 9, 2023, <https://missilethreat.csis.org/defsys/sm-3/>.

54 Kingston Reif, "U.S. and Allied Ballistic Missile Defenses in the Asia-Pacific Region", Arms Control Association, January 2019, <https://www.armscontrol.org/factsheets/us-and-allied-ballistic-missile-defenses-asia-pacific-region>.

yang semakin meningkat telah menjadikan Tiongkok sebagai ancaman keamanan utama bagi Jepang.<sup>55</sup> Begitu juga dengan Australia dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2016, Pemerintah Australia mengkritik Tiongkok secara langsung dalam beberapa hal, seperti merujuk pada negara – negara baru yang kuat yang menginginkan pengaruh yang lebih besar dan menentang beberapa peraturan dalam tatanan global yang ditetapkan sekitar 70 tahun lalu, menyebabkan ketidakpastian dan ketegangan.<sup>56</sup> Jepang dan Australia memiliki kekhawatiran yang sama terhadap Tiongkok.

Tiongkok merupakan sebuah negara adidaya yang sedang berkembang. Kemampuan militer yang terus meningkat, serta keberhasilan ekonomi menjadikan pentingnya Tiongkok dalam sistem internasional. Tiongkok dianggap sebagai ancaman terbesar terhadap keamanan internasional karena kenaikan kemampuannya tersebut.<sup>57</sup> Kebangkitan militer Tiongkok merupakan salah satu cara menuju impian Tiongkok akan kekuatan global, yang tentunya akan menimbulkan ancaman bagi negara – negara di kawasan Indo Pasifik.<sup>58</sup> Tiongkok tidak hanya sebagai ancaman keamanan utama bagi Jepang, namun kedua negara juga memiliki permasalahan terkait sengketa wilayah Kepulauan di Laut Tiongkok Timur.

Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe

55 Tim Kelly, "Japan lists China as bigger threat than nuclear-armed North Korea", Reuters, September 27, 2019, <https://www.reuters.com/article/us-japan-defence/japan-promotes-china-as-bigger-threat-than-nuclear-armed-north-korea-idUSKBN1WC051/>.

56 Merriden Varrall, "Australia's Response to China in the Pacific: From Alert to Alarmed", in the book *The China Alternative*, ed. Graeme Smith and Terence Wesley-Smith (Australian National University Press, 2022).

57 Owen Tench "Has the Threat Posed by China to International Security Been Overstated?" *Journal of Global Faultlines* 10, no. 2 (2023): 149–64. <https://www.jstor.org/stable/48750201>.

58 Thangavel K. Balasuramian and Ashok Kumar Murugesan, "China's Rising Missile and Naval Capabilities in the Indo-Pacific Region Security Implications for India and Its Allies", *Journal of Indo-Pacific Affairs*.

pada 14 Maret 2022, merekomendasikan Jepang mempertimbangkan untuk mewisuda fasilitas senjata nuklir Amerika Serikat di wilayah Jepang, hal itu tanggapan terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Menurut Shinzo Abe, Ukraina menjadi negara yang rentan setelah meninggalkan senjata nuklirnya pada tahun 1994, serta karena meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di wilayah maritim Jepang dan sekitarnya, hal itu membuat Jepang kurang aman.<sup>59</sup> Pada 2015 dalam buku putih pertahanan Tiongkok, Tiongkok mengkritik modernisasi militer yang dilakukan Jepang sebagai kekhawatiran besar terhadap kawasan Laut Tiongkok Timur. Jepang merespon pada buku putih pertahanannya pada tahun yang sama menyebut Tiongkok sebagai ancaman potensial.<sup>60</sup> Dari data tersebut, Jepang menganggap Tiongkok adalah sebuah ancaman nyata baginya, selain karena peningkatan kekuatannya, Jepang dan Tiongkok memiliki sengketa wilayah di Laut Tiongkok Timur. Kurangnya rasa kepercayaan dari kedua negara membuat Jepang merasa khawatir sewaktu – waktu Tiongkok dapat menyerang Jepang dengan kekuatan yang ia punya khususnya di Laut Tiongkok Timur.

Pada 2017, Perdana Menteri Malcolm Turnbull berpidato saat di Singapura yang mengingatkan bahaya agresi Tiongkok dan pentingnya menjaga tatanan berbasis aturan, menyoroti tindakan sepihak untuk melakukan militerisasi dan menciptakan wilayah, Turnbull menyarankan Tiongkok untuk menghormati kedaulatan negara lain. Sebagai mitra dagang terbesar Australia, Tiongkok sangat berpengaruh terhadap perekonomian Australia. Dampak dari kebangkitan Tiongkok bagi Australia secara ekonomi salah

59 Purnendra Jain, "Ukraine war triggers debate on Japan's nuclear option", The Lowy Institute, March 14, 2022, <https://www.loyyinstitute.org/the-interpretor/ukraine-war-triggers-debate-japan-s-nuclear-option>.

60 Edmund J. Burke and Timothy R. Heath, eds., "China's Military Activities in the East China Sea Implications for Japan's Air Self-Defense Force", RAND Corporation 6.

satunya pada awal 2019, saat ekspor batu bara Australia terhambat di pelabuhan di timur laut Tiongkok. Meskipun hal itu disanggah oleh Tiongkok, namun terdapat kecurigaan perlambatan yang terjadi karena pembalasan terhadap larangan Australia terhadap perusahaan telekomunikasi Tiongkok Huawei untuk ikut serta dalam penawaran jaringan 5G Australia.<sup>61</sup> Tindakan yang dilakukan Tiongkok berpengaruh terhadap Australia karena Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi Australia.

Pada bulan April 2022 Tiongkok dan Kepulauan Solomon menandatangani pakta keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menimbulkan kekhawatiran regional terhadap kehadiran militer Tiongkok di masa depan disana. Kepulauan Solomon cukup dekat jaraknya dengan Australia, sekitar 2000 km dari pantai Australia. Perjanjian tersebut memberikan izin untuk Angkatan Laut Tiongkok berlabuh dan mengisi kembali kapal di Kepulauan Solomon, meletakkan dasar bagi fasilitas yang bisa diperluas seiring berjalannya waktu.<sup>62</sup> Hal itu membuat Australia khawatir karena keberadaan Tiongkok yang dekat dengan wilayah Australia dengan adanya pakta keamanan yang ditandatangani Tiongkok dan Kepulauan Solomon.

Dari data di atas, Australia memiliki kekhawatiran terhadap Tiongkok, selain karena kebangkitan Tiongkok akan berdampak pada ekonomi Australia, tetapi juga kekhawatiran akan kehadiran Tiongkok di Kepulauan Pasifik. Jarak antara Kepulauan Pasifik dengan Australia sangat dekat

hanya berjarak 2000 km. Dengan jarak yang sedekat itu, dan Tiongkok yang sudah menandatangani pakta keamanan dengan salah satu negara di Kepulauan Pasifik tepatnya Kepulauan Solomon, membuat Australia khawatir karena hal itu dapat membahayakan Australia. Tiongkok yang dari segi militer memiliki teknologi yang canggih dan dengan jarak sedekat itu, dapat menyerang Australia dengan sangat mudah. Faktor keberadaan sekutu dapat menjelaskan alasan kenapa Jepang memilih melakukan *balancing* dengan Australia. Selain Jepang memiliki kekuatan internalnya yang dapat ditawarkan untuk Australia, juga karena Jepang dan Australia memiliki kepentingan yang sama yaitu memiliki kekhawatiran terhadap Tiongkok sebagai sebuah ancaman. Maka faktor keberadaan sekutu dapat menjelaskan alasan Jepang melakukan *balancing* dengan Australia melalui Perjanjian *Reciprocal Acces Agreement* (RAA).

#### Balancing di Masa Damai

Faktor *peace and war* bisa dikaitkan dengan alasan Jepang memilih Australia untuk melakukan kerjasama sebagai bentuk *balancing* terhadap Tiongkok. Masa sekarang merupakan masa damai dan belum terjadi perang antara Jepang dan Tiongkok, namun dimasa damai ini Jepang melakukan kerjasama RAA dengan Australia sebagai upaya untuk mengadapi Tiongkok yang kemungkinan bisa menyerang sewaktu - waktu.

Kebijakan luar negeri Jepang memandang kawasan Indo Pasifik adalah fokus utama Jepang. Pada 2016 Perdana Menteri Shinzo Abe memperkenalkan visi Jepang yaitu Indo Pasifik yang Bebas dan Terbuka (Free and Open Indo Pasifik, FOIP), yang artinya Jepang akan mendukung supremasi hukum termasuk mendorong kebebasan navigasi, perdagangan bebas, kemakmuran ekonomi, serta perdamaian dan stabilitas.

61 Merriden Varrall, "Australia's Response to China in the Pacific: From Alert to Alarmed", in the book *The China Alternative*, ed. Graeme Smith and Terence Wesley-Smith (Australian National University Press, 2022).

62 Brian Harding and Camilla Pohle, "China's Search for a Permanent Military Presence in the Pacific Islands after the Solomon Islands signed a security pact with Beijing in April, Kiribati maybe considering a similar deal", United States Institute Of Peace, July 21, 2022, <https://www.usip.org/publications/2022/07/chinas-search-permanent-military-presence-pacific-islands>.

Pendekatan Jepang terhadap Indo Pasifik tersebut sejalan dengan upaya Australia untuk mencapai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berketahanan berdasarkan norma dan aturan yang disepakati. Jepang dan Australia disatukan oleh nilai – nilai bersama, termasuk komitmen terhadap demokrasi, hak asasi manusia, perdagangan bebas dan tatanan internasional berbasis aturan. selain itu Jepang dan Australia mempunyai aliansi yang sama yaitu Amerika Serikat, dan Jepang – Australia komitmen terhadap kawasan Indo Pasifik yang terbuka, stabil dan sejahtera. Perekonomian Jepang dan Australia sangat saling melengkapi, berakar kuat di Indo Pasifik dan bergantung pada perdagangan bebas dan terbuka serta rantai pasokan yang tangguh.<sup>63</sup> Dari data di atas pemilihan Australia sebagai mitra melalui Perjanjian Akses Timbal Balik kelihatannya tepat untuk Jepang.

Faktor Tiongkok sangat mempengaruhi Perjanjian Akses Timbal Balik Jepang – Australia. Pertama, Perjanjian Akses Timbal Balik terjadi dikarenakan Jepang dan Australia khawatir terhadap meningkatnya ketegasan Tiongkok. Tiongkok berupaya merubah status quo dengan cara melakukan pemaksaan di aspek maritim menentang tatanan regional yang didukung oleh Konvensi Amerika Serikat dan PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).<sup>64</sup> Misalnya, undang – undang Penjaga Pantai Tiongkok yang dapat menggunakan kekerasan apabila terdapat kapal asing memasuki wilayah yuridiksi Tiongkok, Undang – undang tersebut dirilis mengabaikan rezim hukum internasional dan UNCLOS.<sup>65</sup> Di

Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok berusaha melakukan klaim sepihak dan berupaya mengambil alih Scarborough Shoal dari Filipina yang bertentangan dengan putusan arbitrase. Tiongkok juga pernah terlibat dengan beberapa negara ASEAN terkait sumber daya dan eksploitasi Laut Tiongkok Selatan seperti dengan Vietnam.<sup>66</sup> Tiongkok yang melakukan klaim sepihak berdasarkan sejarahnya dan berupaya mengubah status quo meningkatkan ketidakpastian di kawasan, hal itu membuat Jepang dan Australia khawatir.

Faktor kedua adalah Tiongkok yang mendukung infrastruktur di negara-negara Asia, untuk memperluas pengaruhnya dan seolah-olah untuk mengimbangi ketegasannya. Misalnya dari bagian proyek *Belt Road Initiative* (BRI), Tiongkok mendanai kereta cepat Jakarta – Bandung, yang menggelontarkan dana US\$4,5 miliar yang disediakan oleh *China Development Bank*, melalui proyek ini Tiongkok mampu menegaskan pengaruhnya. Yang mengejutkan adalah Tiongkok bukan lah satu – satunya negara yang menawarkan pendanaan proyek kereta cepat ini, Tiongkok bersaing dengan Jepang dalam hal ini. Namun, Indonesia lebih memilih Tiongkok dengan keuntungan tambahan dari Tiongkok seperti tawaran transfer teknologi, dan alasan utama Jepang kalah tawaran, karena Jepang menginginkan jaminan pinjaman dari pemerintah Indonesia.<sup>67</sup> Tiongkok juga melakukan pendanaan kepada Kamboja untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan jalan tol. Hal itu menunjukkan semakin

63 Department of Foreign Affairs and Trade, “Japan country brief”, Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, <https://www.dfat.gov.au/geo/japan/japan-country-brief>.

64 Kyoko Hatekayama, “The Deepening Japan- Australia Security Relationship: Deterrence against China or Alternatives to the Region?”, Asia Society Australia-Japan Fellow, February 19, 2023, <https://asiasociety.org/australia/deepening-japan-australia-security-relationship-deterrence-against-china-or-alternatives-region>.

65 Kentaro Furuya, “The China Coast Guard Law and

Challenges to the International Order – Implications for CCG Activity around the Senkaku Islands”, The Sasakawa Peace Foundation, March 8, 2021, [https://www.spf.org/iina/en/articles/furuya\\_03.html](https://www.spf.org/iina/en/articles/furuya_03.html).

66 Kei Koga, “Four Phases of South China Sea Disputes 1900-2020”, *Managing Great Power Politics Transitions*, 2022, [https://doi.org/10.1007/978-981-19-2611-2\\_3](https://doi.org/10.1007/978-981-19-2611-2_3).

67 Teesta Prakash and Jack Sato, “Geopolitics and the Jakarta-Bandung high-speed railway”, *lowy institute*, October 27, 2023, . <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/geopolitics-jakarta-bandung-high-speed-railway>.

besarnya pengaruh Tiongkok terhadap Kamboja. Selain itu, Tiongkok juga mendekati beberapa negara di Kepulauan Pasifik dan memberikan tawaran bantuan ekonomi dan teknis tanpa memberikan persyaratan politik apapun. Pada April 2022, Tiongkok berhasil menyelesaikan pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon.<sup>68</sup> Hal itu mengejutkan Australia, Amerika dan Selandia Baru, karena hal ini menegaskan Tiongkok yang semakin besar jangkauannya di wilayah tersebut.

Faktor ketiga, Australia merasa jengkel terhadap upaya Tiongkok untuk mempengaruhi dan campur tangan dalam politik luar negerinya. Australia mengambil sikap kebijakan yang seimbang dengan secara bersamaan mendukung tujuan yang sedikit kontradiktif, yaitu Australia berusaha menjaga hubungan baik dengan Tiongkok sekaligus mendukung tatanan berbasis aturan di kawasan. Manfaat ekonomi yang di dapatkan Australia dari Tiongkok mendorongnya untuk mempertahankan kebijakan ambiguitas strategis dengan memisahkan politik dan ekonomi.<sup>69</sup> Namun, karena terungkapnya intervensi Tiongkok dalam politik dalam negeri Australia yaitu Huang Xiamo seorang miliarder pengembang properti dari Tiongkok datang dan mendapatkan izin tinggal permanen dengan cepat dan pengaruh politik. Huang merupakan donor politik utama bagi partai liberal dan partai buruh yang juga memberikan sumbangan besar kepada universitas - universitas Australia, termasuk ke Universitas Teknologi Sydney pada 2014 untuk mendirikan Institut Hubungan Australia - Tiongkok (Australian-China Relations Institute, ACRI).

Huang disorot pertama kali ketika

68 Kyoko Hatekayama, "The Deepening Japan- Australia Security Relationship: Deterrence against China or Alternatives to the Region?", Asia Society Australia-Japan Fellow, February 19, 2023, <https://asiasociety.org/australia/deepening-japan-australia-security-relationship-deterrence-against-china-or-alternatives-region>.

69 Hatekayama, "The Deepening Japan- Australia"

mengadakan konferensi pers untuk Senator Sam Dastyari, politisi yang sedang naik daun dari Partai Buruh saat menjelang pemilihan federal pada awal Juli 2016. Dastyari mengatakan Laut Tiongkok Selatan adalah urusan Tiongkok sendiri dan Australia menghormati keputusan Tiongkok. Hal itu berbeda dengan posisi yang diambil sehari sebelumnya oleh Menteri Bayangan Partai Buruh Stephen Cornay, yang menyatakan dengan tegas bahwa pemerintahan Partai Buruh mengizinkan operasi kebebasan navigasi dan mengancam pembangunan pulau yang tidak masuk akal oleh Tiongkok. Dan hal itu bersamaan dengan laporan berita bahwa donor etnis Tiongkok lainnya memiliki hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang menimbulkan kemarahan politik di Australia, sehingga memaksa Dastyari untuk meminta maaf dan mengundurkan diri dari posisi *frontbench* partainya. Dan mengejutkannya donor terbesar yang memiliki hubungan dekat dengan PKT adalah Huang Xiamo, ia mengancam akan membatalkan sumbangan sebesar AU\$400.000 yang dijanjikan kepada Partai Buruh jika partai tersebut tidak melunakkan pendiriannya terhadap Laut Tiongkok Selatan.<sup>70</sup> Karena hal tersebut Perdana Menteri Malcom Turnbull mengumumkan rancangan Undang - undang untuk melawan campur tangan asing dan spionase.

Oleh sebab itu, meskipun kesan ancaman Jepang dan Australia tidak sama, namun Jepang dan Australia memiliki kekhawatiran yang sama terhadap nasib tatanan regional karena perilaku agresif Tiongkok yang menentang tatanan berbasis aturan berdasarkan kawasan Indo Pasifik yang bebas, terbuka, inklusif, dan sejahtera. Pada pertemuan 2 + 2 Menteri Luar Negeri Jepang dan Australia, Menteri

70 Center for Strategic and International Studies (CSIS), "Countering China's Influence Operations: Lessons from Australia", CSIS, May 8, 2020, <https://www.csis.org/analysis/countering-chinas-influence-operations-lessons-australia>.

Pertahanan Jepang dan Australia, ke empat Menteri menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan khawatir atas upaya Tiongkok untuk menyatukan Taiwan.<sup>71</sup> Invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada February 2022 menimbulkan kekhawatiran kedua negara bahwa Tiongkok akan mengambil langkah berani terhadap Taiwan dan Kepulauan Senkaku. Perdana Menteri Kishida menyampaikan Ukraina mungkin akan menjadi Asia Timur besok.

Selain memiliki kekhawatiran yang sama, Jepang dan Australia melihat bahwa kesenjangan kekuatan antara Tiongkok dan Amerika semakin kecil. Meskipun Amerika tetap menjadi negara satu-satunya yang dapat bersaing dengan Tiongkok, namun kehadirannya relatif menurun. Sebagai hasil pertumbuhan ekonomi Tiongkok berkembang dengan cepat setelah bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada 2001, sehingga kesenjangan kekuatan ekonomi antara Tiongkok dan Amerika telah berkurang cepat. Meskipun perekonomian Amerika pada 1960 menyumbang 40 persen terhadap PDB dunia, namun angka tersebut turun pada 2019 menjadi 24,4 persen. Sedangkan Tiongkok menyumbang 16,3 persen terhadap perekonomian dunia. Untuk menghadapi kesenjangan antara Tiongkok dan Amerika, Jepang dan Australia merasa perlu untuk mendukung Amerika dengan mengambil lebih banyak beban.<sup>72</sup> Dari data di atas faktor *peace and war* dapat menjelaskan motif Jepang melakukan *balancing* dengan Australia.

71 Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Ninth Japan-Australia Foreign and Defence Ministerial Consultations ("2+2"), June 9, 2021, [https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e\\_000297.html](https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000297.html).

72 Kyoko Hatakayama, "The Deepening Japan-Australia Security Relationship: Deterrence against China or Alternatives to the Region?", Asia Society Australia-Japan Fellow, February 19, 2023, <https://asiasociety.org/australia/deepening-japan-australia-security-relationship-deterrence-against-china-or-alternatives-region>.

## Kesimpulan

Motif Jepang menandatangani Perjanjian Akses Timbal Balik atau *Reciprocal Access Agreement* (RAA) Jepang - Australia, karena beberapa aspek tingkat ancaman Tiongkok terhadap Jepang dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Jepang melakukan perjanjian RAA. Aspek pertama kekuatan, Tiongkok dari segi militer memiliki pengeluaran pertahanan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dari segi ekonomi, Tiongkok berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global rata-rata sekitar 38,6 persen, lebih tinggi dari gabungan negara - negara G7 menurut data Bank Dunia periode 2013-2021. Dari segi populasi, Tiongkok merupakan negara dengan populasi terbesar hingga 2022. Aspek kedua kedekatan geografis, Tiongkok dan Jepang memiliki jarak yang dekat dengan jarak terpendek yang dihitung dari perbatasan utama termasuk pulau - pulau besar adalah 603 km. Aspek ketiga kekuatan ofensif, dalam hal ini Tiongkok memang sebuah negara yang memiliki kemampuan militer khusus yaitu mengembangkan misil hipersonik dan telah berhasil diluncurkan. Aspek keempat niatan agresif, Tiongkok berusaha menambah kedaulatannya di Laut Tiongkok Timur dengan mengklaim Kepulauan Senkaku atau Diaoyu.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi Jepang melakukan *balancing* dengan Australia. Pertama, faktor negara kuat atau lemah, Jepang secara militer termasuk dalam negara kuat dibandingkan dengan militer Australia. Militer Jepang menduduki peringkat kelima terbesar di dunia yang bisa ditawarkan untuk bekerja sama dengan Australia. Kedua Ketersediaan Sekutu, Jepang memiliki kekuatan internalnya sendiri dalam hal militer yaitu kepemilikan senjata militer yang lebih canggih dan teknologi yang lebih maju dari Australia. Namun karena Jepang dan Australia memiliki kepentingan yang sama yaitu menganggap

Tiongkok sebagai ancaman. Ketiga Damai dan Perang, Suatu negara akan cenderung memilih untuk mengambil sikap *balancing* pada tahap awal ketegangan. Dalam kondisi damai ini Jepang memilih melakukan kerjasama dengan Australia sebagai upaya untuk menghadapi Tiongkok yang kemungkinan bisa menyerang sewaktu – waktu. Selain itu dalam faktor Perang dan Damai bisa untuk menjelaskan pemilihan Australia sebagai mitra kerja sama RAA.

Keputusan Jepang melakukan kerja sama melalui Perjanjian RAA dengan Australia merupakan sebuah kemajuan bagi Jepang, khususnya di bidang militer. Perjanjian RAA yang ditandatangani pada tahun 2022 adalah Perjanjian pertama bagi Jepang karena mengizinkan militer negara lain untuk berada di wilayahnya, setelah 60 tahun Jepang hanya mempercayakan Amerika Serikat berada di wilayahnya. Kesepakatan tersebut juga merupakan sebuah kesepakatan penting yang dapat membuka peluang untuk negara lain kerja sama dengan Jepang dalam bidang militer. Tindakan yang dilakukan Jepang dan Australia sebuah langkah maju guna menghadapi ancaman yang sewaktu-waktu dapat menyerang wilayah masing-masing.

Dalam penelitian ini, penulis memandang teori *Balance of Threat* yang dirumuskan oleh Stephen M. Walt dapat menjelaskan motif dibalik Jepang menandatangani perjanjian RAA dengan Australia. Dalam teori ini dijelaskan terdapat empat aspek untuk mengukur tingkat ancaman suatu negara, serta faktor – faktor negara melakukan *balancing* atau *bandwoganing*. Sehingga dalam peristiwa ini Motif Jepang menandatangani perjanjian RAA dapat dijawab dengan teori *Balance of Threat* dari Stephen M. Walt.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asia Maritime Transparency Initiative. 2016. Center For Strategis & International Studies. April 14. <https://amti.csis.org/east-china-sea-tensions/>.
- Australian Government . 2016. Defence White Paper 2016. Canberra: Department of Defence.
- Bekampis, Jurgis. 2023. "China's Rising Military Threat in the Indo-Pacific Region: Change in Japan's Defence Policy in 2013–2022." LITHUANIAN ANNUAL STRATEGIC REVIEW 2023 Volume 21 52 .
- Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif (2nd ed.). Kencana.
- Caggiano, Luke. 2023. Arms Control Association. May. <https://www.armscontrol.org/act/2023-05/news/china-deploys-new-submarine-launched-ballistic-missiles>.
- CARR, Andrew. 2019. "NO LONGER A MIDDLE POWER Australia's Strategy in the 21st Century." The Institut francais des relations internationales (ifri) 10.
- Center for Strategic and International Studies (CSIS). 2020. Center for Strategic and International Studies. May 8. <https://www.csis.org/analysis/countering-chinas-influence-operations-lessons-australia>.
- Chandran, Nyshka. 2017. Cnbc. December 20. <https://www.cnbc.com/2017/12/20/east-china-sea-could-be-riskier-than-south-china-sea.html>.
- Darmawan, Arief Bakhtiar. 2020. Japan's Balanced Strategy to Face China's Threat in South China Sea Dispute. 30 Oktober. Diakses November 12, 2022. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/download/35814/18646>.

- Department of Foreign Affairs and Trade. nd. Japan country brief. Australia: Australian Government.
- Department of Foreign Affairs and Trade. 2024. Japan country brief. Australia: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade.
- Edmund J. Burke, Timothy R. Heath, Jeffrey W. Hornung, Logan Ma, Lyle J. Morris, Michael S. Chase. 2018. "China's Military Activities in the East China Sea Implications for Japan's Air Self-Defense Force." RAND Corporation 6.
- Envall, H. D. P. 2018. Australia–Japan defence deal: noteworthy, not newsworthy. Jan 22. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-japan-defence-deal-noteworthy-not-newsworthy>.
- Furuya, Kentaro. 2021. The Sasakawa Peace Foundation. March 8. [https://www.spf.org/iina/en/articles/furuya\\_03.html](https://www.spf.org/iina/en/articles/furuya_03.html).
- Galloway, Anthony. 2022. smh.com.au. January 10. <https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-commits-to-3-5-billion-tank-purchase-from-the-us-20220109-p59mub.html>.
- Geodatos. 2024. Geodatos. March 4. <https://www.geodatos.net/en/distances/countries/from-japan-to-china>.
- Gertz, Bill. 2015. The Washington Free Beacon. December 21. <https://freebeacon.com/national-security/china-tests-new-icbm-from-railroad-car/>.
- Hagstrom, Linus. 2012. East Asia Forum. September 17. <https://eastasiaforum.org/2012/09/17/china-japan-tensions-over-senkaku-purchase-an-orchestrated-affair/>.
- Harding, Brian, and Camilla Pohle. 2022. United States Institute of Peace. July 21. <https://www.usip.org/publications/2022/07/chinas-search-permanent-military-presence-pacific-islands>.
- Hellyer, Dr Marcus. 2021. The Australian Strategic Policy Institute. May 26. <https://www.aspi.org.au/report/cost-defence-aspi-defence-budget-brief-2021-2022>.
- Hughes, Christopher W. 2022. Cambridge Elements, Elements in Politics and Society in East Asia, JAPAN AS A GLOBAL MILITARY POWER . United Kingdom: Cambridge University Press.
- Jamison, Matthew. 2020. Strategy bridge. August 11. <https://thestrategybridge.org/the-bridge/2020/8/11/countering-chinas-counter-intervention-strategy>.
- Kelly, Tim. 2019. Reuters.com. September 27. <https://www.reuters.com/article/us-japan-defence/japan-promotes-china-as-bigger-threat-than-nuclear-armed-north-korea-idUSKBN1WC051/>.
- Koga, Kei. 2022. Four Phases of South China Sea Disputes 1990–2020. Singapore: Global Political Transitions .
- Kyoko Hatakeyama. 2023. Asia Society. February 19. <https://asiasociety.org/australia/deepening-japan-australia-security-relationship-deterrence-against-china-or-alternatives-region>.
- Lowy Institute. 2022. Lowy Institute . March 14. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/ukraine-war-triggers-debate-japan-s-nuclear-option>.
- Marjorie Vanbaelinghem, Alice Ortega. 2022. "THE JAPANESE AND THEIR SELF-DEFENCE FORCES TODAY." Institut De Recherche Strategique De L'ecole Militaire 3 - 8.
- Mark, Craig William. 2019. "Almost An Alliance : The Development of Japanese-Australian Relations." The Kyoritsu

- journal of international studies 103-113.
- McDermot, Peter John. 2021. *The Australia-Japan Defence and Security Relationship*. Deakin University.
- Michael Heazlea and Yuki Tatsumi. 2018. "Explaining Australia-Japan security cooperation and its prospects: 'the interests that bind'." *The Pacific Review*.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2021. Ministry of Foreign Affairs of Japan. June 9. [https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e\\_000297.html](https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000297.html).
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2016. Status of activities by Chinese government vessels and Chinese fishing vessels in waters. Japan: mofa.go.jp.
- Missile Defense Advocacy Alliance. 2023. Missile defense advocacy Alliance. January. <https://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/china/df41/>.
- . 2023. Missile Defense Advocacy Alliance. January 13. <https://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/china/dong-feng-17/>.
- . 2023. Missile Defense Advocacy Alliance. January. <https://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/china/dh-10-cj-10/>.
- Missile Defense Project. 2023. Missile Threat. March 9. <https://missilethreat.csis.org/defsys/sm-3/>.
- Naval Technology. 2023. Naval-Technology.com. February 17. <https://www.naval-technology.com/projects/shang-class-nuclear-powered-attack-submarines-china/?cf-view&cf-closed>.
- Prakash, Teesta, and Jack Sato. 2023. *The Interpreter*. October 27. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/geopolitics-jakarta-bandung-high-speed-railway>.
- Reif, Kingston. 2019. arms control. January. <https://www.armscontrol.org/factsheets/us-allied-ballistic-missile-defenses-asia-pacific-region>.
- rfa. 2022. Japan, Australia sign defense pact seen as response to China. Washington, DC, 01 06.
- Schreer, Benjamin. 2014. aspistrategist. Januari 28. <https://www.aspistrategist.org.au/the-strategic-implications-of-chinas-hypersonic-missile-test/>.
- Scott, David. 2019. "The Geoeconomics and Geopolitics of Japan's 'Indo-Pacific' Strategy." *Journal of Asian Security and International Affairs*.
- SIPRI Military Expenditure Database. 2022. TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE. SIPRI.
- Smith, Sheila A. 2022. "council on foreign relations." cfr.org. December 20. <https://www.cfr.org/article/how-japan-doubling-down-its-military-power>.
- Statista. 2024. Statista. January 17. <https://www.statista.com/statistics/270129/population-growth-in-china/>.
- Stockholm International Peace Research Institute. 2023. *The SIPRI Top 100 arms-producing and military services companies in the world, 2022*. Sweden: SIPRI Arms Industry Database.
- Stockholm International Peace Research Institute. 2022. *World military expenditure passes \$2 trillion for first time*. Sweden: SIPRI Military Expenditure Database .
- Tench, Owen. 2023. "Has the threat posed by China to international security been overstated?" *Journal of Global Faultlines* 149.

- Thangavel K. Balasubramaniam, Ashok Kumar Murugesan. 2020. "China's Rising Missile and Naval Capabilities in the Indo-Pacific Region Security Implications for India and Its Allies." *Journal Of Indo Pacific Affairs* 102 - 103.
- Thomas Wilkins. 2022. Australian Institute of International Affairs. Jan 20. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/another-piece-jigsaw-australia-japan-sign-long-awaited-reciprocal-access-agreement/>.
- Tosaki, Hirofumi. 2019. Nuclear arms control in a post-INF Treaty period: a chance to engage China. Japan: The Japan Institute of International Affairs.
- Uchida, Kazumichi. 2016. "Between Balance and Bandwagon Friendship of the US and Japan." *JPI* 42.
- Vanaga, Nora. 2014. *China's Military Rise: The Lack of Transparency and Internal Political Uncertainty*. Latvia: National Defence Academy of Latvia Center for Security and Strategic Research, 1.
- Varrall, Merriden. 2021. "Australia's Response to China in the Pacific: From Alert to Alarmed." In *The China Alternative*, by TERENCE WESLEY-SMITH GRAEME SMITH, 111. ANU Press.
- Walt, Stephen M. 2002. "Keeping the World 'Off-Balance': Self-Restraint and U.S. Foreign Policy." In *America Unrivaled: The Future of the Balance of Power*, 121-154.
- Walt, Stephen M. 1987. "Explaining Alliance Formation." In *The Origins of Alliances*, by Stephen M. Walt, 29 - 32. Cornell University Press.
- Watt, Nicole Brangwin and David. 2022. *The state of Australia's defence: a quick guide*. Australia: Parliament of Australia.
- Webb, David. 2017. Missile Defense Advocacy Alliance. February. <https://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/china/dong-feng-21-css-5/>.
- Wilkins, Thomas. 2022. "Enhancing the 'Special Strategic Partnership': Australia and Japan Sign Reciprocal Access Agreement." *International Information Network Analysis*, 02 21.
- Xinhua. 2022. English.Gov.cn. October 27. [https://english.www.gov.cn/news/topnews/202210/27/content\\_WS6359c2b3c6d0a757729e1d01.html](https://english.www.gov.cn/news/topnews/202210/27/content_WS6359c2b3c6d0a757729e1d01.html).
- Zhou, Weifeng. 2015. *China's growing assertiveness in the South China Sea*. Madrid, November 05.